



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 180/ 676 /2022

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
ACEH TAHUN 2022

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

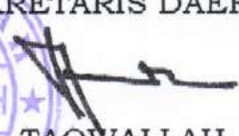
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penetapan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan berdasarkan usulan SKPA/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Aceh dapat mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada SKPA/Unit Kerja pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur, agar segera mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Gubernur berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, serta dapat melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya jika dipandang perlu.
- KELIMA : penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan/mekanisme pembentukan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) masing-masing pada Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 April 2022 M
18 Ramadhan 1443 H

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

TAQWALLAH



SALINAN -dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
4. Inspektur Aceh; dan
5. Yang bersangkutan.-----

[illegible]

IRBC ORGANISASI

Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengkajian Keuangan Aceh			✓	Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Pemangkasan akan mengakibatkan pemangkasan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat pemangkasan jabatan Fungsional dan Bedanya Aparatur. Pada dilakukan pemangkasan nonakutir pengurangan dan pengalihan utang pejabat, kemampuan pemangkasan EUP (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administrasi EUP 58 tahun setelah modifikasi jabatan fungsional dengan tingkat tertentu EUP bisa mencapai 60 tahun, ada pemangkasan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap pemangkasan angka kreditnya
Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh			✓	Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Pemangkasan akan mengakibatkan pemangkasan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat pemangkasan jabatan Fungsional dan Bedanya Aparatur. Pada dilakukan pemangkasan nonakutir pengurangan dan pengalihan utang pejabat, kemampuan pemangkasan EUP (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administrasi EUP 58 tahun setelah modifikasi jabatan fungsional dengan tingkat tertentu EUP bisa mencapai 60 tahun, ada pemangkasan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap pemangkasan angka kreditnya
Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh			✓	Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Pemangkasan akan mengakibatkan pemangkasan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat pemangkasan jabatan Fungsional dan Bedanya Aparatur. Pada dilakukan pemangkasan nonakutir pengurangan dan pengalihan utang pejabat, kemampuan pemangkasan EUP (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administrasi EUP 58 tahun setelah modifikasi jabatan fungsional dengan tingkat tertentu EUP bisa mencapai 60 tahun, ada pemangkasan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap pemangkasan angka kreditnya
Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh			✓	Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Pemangkasan akan mengakibatkan pemangkasan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat pemangkasan jabatan Fungsional dan Bedanya Aparatur. Pada dilakukan pemangkasan nonakutir pengurangan dan pengalihan utang pejabat, kemampuan pemangkasan EUP (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administrasi EUP 58 tahun setelah modifikasi jabatan fungsional dengan tingkat tertentu EUP bisa mencapai 60 tahun, ada pemangkasan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap pemangkasan angka kreditnya
Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh			✓	Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Pemangkasan akan mengakibatkan pemangkasan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat pemangkasan jabatan Fungsional dan Bedanya Aparatur. Pada dilakukan pemangkasan nonakutir pengurangan dan pengalihan utang pejabat, kemampuan pemangkasan EUP (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administrasi EUP 58 tahun setelah modifikasi jabatan fungsional dengan tingkat tertentu EUP bisa mencapai 60 tahun, ada pemangkasan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap pemangkasan angka kreditnya

BKRO ORGANISASI

Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penyusunan dan melaksanakan perencanaan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belang Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan nomenklatur pengorganisasian dan pengkalkulasian ulang pejabat, Kementerian pemerintahan RI/P (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administratif RI/P 58 tahun setelah mencapai jabatan fungsional dengan jenjang tertentu RI/P bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kreditnya
Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penyusunan dan melaksanakan perencanaan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belang Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan nomenklatur pengorganisasian dan pengkalkulasian ulang pejabat, Kementerian pemerintahan RI/P (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administratif RI/P 58 tahun setelah mencapai jabatan fungsional dengan jenjang tertentu RI/P bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kreditnya
Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penyusunan dan melaksanakan perencanaan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belang Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan nomenklatur pengorganisasian dan pengkalkulasian ulang pejabat, Kementerian pemerintahan RI/P (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administratif RI/P 58 tahun setelah mencapai jabatan fungsional dengan jenjang tertentu RI/P bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kreditnya
Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penyusunan dan melaksanakan perencanaan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belang Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan nomenklatur pengorganisasian dan pengkalkulasian ulang pejabat, Kementerian pemerintahan RI/P (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administratif RI/P 58 tahun setelah mencapai jabatan fungsional dengan jenjang tertentu RI/P bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kreditnya
Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Persekolah Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penyusunan dan melaksanakan perencanaan dalam organisasi, tentang Kebijakan, Satuan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belang Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan nomenklatur pengorganisasian dan pengkalkulasian ulang pejabat, Kementerian pemerintahan RI/P (Batas Usia Pensiun) pegawai, semua pada saat jabatan administratif RI/P 58 tahun setelah mencapai jabatan fungsional dengan jenjang tertentu RI/P bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kreditnya

BIBO ORGANISASI	Peraturan Gubernur Aceh tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebumahan Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Bekerja dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penetapan akan mengakhiri pemangangan akan inganis, tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belanja Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan moneterial penganggaran dan pengkajian ulang, yaitu: Kementerian pemukiman BUP (Batas Ura Pemukiman) pengawal, sesuai pada saat jabatan administrasi BUP 58 tahun setelah menjadi jabatan fungsional dengan jenjang tertentu BUP bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kesediaan.
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Maritim dan Cemping Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Bekerja dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penetapan akan mengakhiri pemangangan akan inganis, tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belanja Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan moneterial penganggaran dan pengkajian ulang, yaitu: Kementerian pemukiman BUP (Batas Ura Pemukiman) pengawal, sesuai pada saat jabatan administrasi BUP 58 tahun setelah menjadi jabatan fungsional dengan jenjang tertentu BUP bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kesediaan.
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Infeksi dan Penyakit Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Bekerja dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penetapan akan mengakhiri pemangangan akan inganis, tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belanja Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan moneterial penganggaran dan pengkajian ulang, yaitu: Kementerian pemukiman BUP (Batas Ura Pemukiman) pengawal, sesuai pada saat jabatan administrasi BUP 58 tahun setelah menjadi jabatan fungsional dengan jenjang tertentu BUP bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kesediaan.
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Bekerja dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penetapan akan mengakhiri pemangangan akan inganis, tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belanja Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan moneterial penganggaran dan pengkajian ulang, yaitu: Kementerian pemukiman BUP (Batas Ura Pemukiman) pengawal, sesuai pada saat jabatan administrasi BUP 58 tahun setelah menjadi jabatan fungsional dengan jenjang tertentu BUP bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kesediaan.
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh			Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Bekerja dan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Penetapan akan mengakhiri pemangangan akan inganis, tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Terdapat penambahan jabatan Fungsional dan Belanja Aparatur. Perlu dilakukan penyusunan moneterial penganggaran dan pengkajian ulang, yaitu: Kementerian pemukiman BUP (Batas Ura Pemukiman) pengawal, sesuai pada saat jabatan administrasi BUP 58 tahun setelah menjadi jabatan fungsional dengan jenjang tertentu BUP bisa mencapai 60 tahun, ada penambahan pada jabatan fungsional tertentu sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan angka kesediaan.

BADAN PENELITIAN
DAN PEMBANGUNAN
ACEH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DINAS PERHUBUNGAN ACEH	Penerbitan Reribut Aceh berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pendudukan atau Qanun Aceh Nomor Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Penghasilan lainnya Provinsi dan Kabupaten/Kota								
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN ACEH	Satu Data Pemerintah Aceh								
	Kepolisian Satu Peta Aceh								
	Infrastruktur Informasi Geospasial Aceh								
	Monevring Evaluasi Pelayanan Informasi Publik								
	Pedoman Pengabdian Masyarakat Informasi Publik dan Dukungan di Lingkungan Pemerintah Aceh								
	Sistem Informasi Aceh Terpaku								
	Acchi Cerdas								
	Interoperabilitas Data								
	Pertemuan Gubernur tentang Pengabdian Masyarakat dan Komunikasi Publik Pemerintah Aceh								
	Tata Cara Pemberian Informasi dan kemutakhiran Penanganan Modal di Aceh								
DINAS PENAYAKAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	Kemungkinan Adanya Perizinan Aceh								
	TarCita Satu Tanah dan/atau Bangunan Miskin Aceh untuk Kegiatan Usaha dengan Karakteristik Tertentu								
	Konfirmasi Status Wilayah Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan								
	Berita Resmi Aceh Nomor 45 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non-Perizinan Kepala Kantor Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
DINAS PERHUBUNGAN ACEH	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
DINAS PERHUBUNGAN ACEH	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pajak Daerah dan Zonasi Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reribut Aceh								

DINAS PETernakan ACEH	Keputusan Kerjasama			✓	Permenjo no 76/2014			Regulasi Pengkajian BLUD	
	Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Molok Pembawa Penyakit Hewan Lainnya untuk Kehewan/Kota, Paspas dan antar Kawasan Dalam Pengepakan Aceh			✓	Permentan no 15/2021			Regulasi Perawatan dan Pengeluaran Ternak dan Produk Hewan	
	penyusutan pengisian, pemrosesan, pengolahan rencana bisnis anggaran			✓	Permentan no 15/2021			Regulasi pengisian, pemrosesan, pengolahan hasil anggaran	
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL ACEH	Tata Cara Pengendalian Pemasangan Sapi dan Kambus Betara Perakatif			✓	Permentan no 15/2016 tentang Sekunderisasi dan Catur Aceh No 65/2016			Regulasi Tata Cara Pengendalian Populasi sapi dan Kambus betara Perakatif	
	Walaupun Ibar Usaha Pertambangan dan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam			✓	PP Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013	Peraturan Pangreh Aceh tahun 2017 dan 2018	Regulasi tentang tata cara pengelolaan hutan dan 3 (tiga) bidan 13 (tiga bidan) pada, sebagai dasar dalam Penguasaan dan Penguasaan Wilayah (aspek Pertambangan) (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Tata Cara Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam Pangreh Aceh tahun 2017 dan 2018	Memastikan potensi sumber daya alam mineral logam di Aceh, mengelola pertambangan secara teratur, terpadu, berdayaguna dan bertanggung jawab lingkungan dan masyarakat (dan usaha bagi pertumbuhan investasi kegiatan ekonomi di Aceh serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat	
	mesak Perikanan Migas, Pemeliharaan Mineral dan Berakura			✓	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Ketentuan Daerah dan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Upah Pekerja POKD Pasal 3 ayat (2) huruf a	Beberapa peraturan daerah yang diberikan ditetapkan pada tingkat kecamatan (kecamatan) yang diberikan untuk provinsi	Isu-isu Dinas ESDM, sebagai kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas ESDM, pendataan dan dan pelayanan kepada masyarakat		
DINAS PENDIDIKAN ACEH	Pada Tata Kode, SPK dan Berakura BLUD UPTD Pengembangan Tesis dan Ketersediaan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh			✓	Permenjo no 76 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Peraturan tentang tata cara pengelolaan BLUD	Keputusan pengkajian kejuruan pada UPTD		
	Tarif Layanan BLUD pada UPTD Pengembangan Tesis dan Ketersediaan Kejuruan			✓	Permenjo no 76 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Peraturan tentang Standar pelayanan pada layanan BLUD	Keputusan tentang produksi pada SMK		
	Kebijakan satuan organisasi tugas fungsi dan tata kerja cabang dinas pada Dinas Pendidikan Aceh	✓		✓	Permenjo no 76 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Peraturan tentang Standar pelayanan pada layanan BLUD	Keputusan tentang produksi pada SMK		
DINAS KOPERASI USAHA KECI, DAN MENENGAH	Pemberian Bantuan Sosial, Bantuan kepada Anak Yatim, Panti dan/atau Yatim Piatu dalam Wilayah Aceh			✓	Permenjo no 12 tahun 2017	Peraturan tentang tata cara pengelolaan BLUD pada UPTD PTOK	Keputusan tentang produksi pada SMK		
	Subsidi Biaya Pengiriman Produk KUMKM			✓	Permenjo no 8 tahun 2019	Peraturan tentang produksi pada layanan BLUD	Keputusan tentang produksi pada SMK		
	Subsidi Biaya Pengiriman Produk KUMKM			✓	PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Konsolidasi, Perencanaan dan Penguasaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Peraturan tentang produksi pada layanan BLUD	Keputusan tentang produksi pada SMK		

[illegible]

